

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran.

LKj IP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Slawi, 20 Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL

Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700426 199001 2 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial.

Secara filosofis, inti dari tugas dan fungsi Dinas Sosial terfokus pada upaya “Mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (masyarakat), “Tat Wam Asih” yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Menolong diri mereka sendiri dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan inti yang mendasar agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidak mampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan (*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan social masyarakat sehingga terwujud ketahanan social masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan UUD RI Tahun 1945 yang diperkuat dengan UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanganan Fakir Miskin, dan UU Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperkuat dengan PP Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah serta serta PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan sosial masyarakat dan warga negara. Dengan kata lain, Dinas Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi penduduk yang masuk dalam kelompok marginal dan rentan yang disebut dengan PMKS, untuk menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan ekonomi.

Esensi dari kata sejahtera memberikan indikasi bahwa:

- a. Tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
- b. Tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya, dan
- c. Tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara, serta
- d. Tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan investasi dan berfungsi sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.

- a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandate „kewajiban negara“ (*state obligation*) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.
- d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2009, bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial
- b. Pemberdayaan Sosial
- c. Perlindungan Sosial
- d. Jaminan Sosial

A. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan Sosial dan konseling psikoSosial

- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi Sosial
- i. Bimbingan Sosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/atau
- k. Rujukan

B. Pemberdayaan Sosial

Istilah Pemberdayaan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep seperti kekuatan atau kemamp[uan diri (*self-strength*), Penguasaan (*control*), Kemandirian (*self reliance/independence*), kebebasan memilih (*own Choice*), Hak (*rights*), Proses pengambilan keputusan sendiri, partisipasi (*participation*), dan sebagainya. Semua konsep tersebut melekat begitu erat dengan konsep tentang pemberdayaan dan nilai - nilai local. Pembewrdayaan dapat diterapkan atau relevan pada tingkat individu maupun pada tingkat kolektivitas, juga relevan untuk bidang ekonomi, social, maupun politik.

Pemberdayaan yang diarahkan pada kemampuan kelompok bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, politik maupun kemampuan proses pengambilan keputusan bagi kelompok atau masyarakat miskin.

Undang – undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha (UU no. 11 tahun 2009). Bentuk pemberdayaan social dapat dilakukan dengan : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulant modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi social; penguatan keserasian social; penataan lingkungan; dan /atau bimbingan lanjut

C. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Salah satu fungsi Negara dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan Sosial adalah melakukan Perlindungan dan jaminan social.

UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas dan
- c. Pengaturan kelembagaan

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya.

Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum.

Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa – jasanya

Hal ini selaras dengan *Declaration of human Rights* pasal 25 yang secara eksplisit menetapkan bahwa “ setiap orang berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, menganggur dan meninggal dunia “ Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 lebih jauh menegaskan bahwa setiap Negara mesti memiliki standar minimum program jaminan social yang mencakup tunjangan tunai hari tua, Sakit, cacat, kematian, pengangguran, serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang sakit.

D. Penanganan Fakir Miskin

Kelompok miskin, Keluarga miskin, serta masyarakat miskin memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas.. Mereka tidak memiliki peluang untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya, meningkatkan kesehatannya, memilih pelayanan-pelayanan public lainnya yang menentukan kualitas kehidupannya sendiri. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh orang miskin disebabkan terbatasnya

dalam kepemilikan asset serta ketidak berdayaan akibat lemahnya daya tawar mereka dalam system kehidupan yang dikelola oleh kelompok non miskin. Dengan demikian konteks penanggulangan kemiskinan, Bantuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berarti perluasan atau peningkatan asset maupun kemampuan kelompok atau masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara penuh, memiliki kemampuan memberikan pengarus, kemampuan mengendalikan , serta terlibat penuh dalam institusi-institusi social ekonomi yang menentukan kualitas hidupnya sendiri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- Penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas;
- Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- Pembinaan terhadap UPTD dan institusi di bidang sosial;
- Pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sosial;

Adapun Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

DAFTAR PEGAWAI

NO	URAIAN	JUMLAH 2017	
1	Jumlah Pegawai		
	a. PNS / CPNS	35	Orang
2	Kualifikasi Pendidikan		
	a. Pasca Sarjana (S2)	8	Orang
	b. Sarjana (S1 / D IV)	12	Orang
	c. Ahli Madya (DIII)	2	Orang
	d. SMA	11	Orang
	e. SMP	-	Orang
	f. SD	2	Orang
3	Pangkat dan Golongan		
	a. Golongan IV	10	Orang
	b. Golongan III	19	Orang
	c. Golongan II	4	Orang
	d. Golongasn I	2	Orang
4	Jumlah Pejabat Struktural & Funhgsional		
	a. Struktural	18	Orang
	b. Fungsional	-	Orang

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Sosial Tegal memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah
1	2	3	4
1	TANAH	-	5 Bidang
2	PERALATAN MESIN	-	
	Alat-alat Besar		59 Unit
	Alat-alat Angkutan		16 Unit
	Alat-alat Bengkel & Alat Ukur		58 Unit
	Alat-alat Pertanian/Peternakan		2 Unit
	Alat-alat Kantor & Rumah Tangga		62 Unit
	Alat-alat Studio dan Komunikasi		21 Unit
	Alat-alat Kedokteran		4 Unit
	Alat-alat Laboratorium		3 Unit

3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	
	Bangunan Gedung		8 Unit
	Monumen		1 Unit
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	
	Jalan Jembatan		3 Unit
	Bangunan Air/Irigasi		6 Unit
	Instalasi		2 Unit
	Jaringan		5 Unit
5	ASET TETAP LAINNYA	-	
	Buku Perpustakaan		.234 Buku
	Barang Bercorak Kesenian /		5 Buah
		38.278	

Selain itu dalam untuk mendukung kinerja terdapat Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/ PMKS, terdiri dari:

NO	(UPTD)	UNIT	SASARAN
1	Loka Bina Karya (LBK)	Unit Pelayanan Sosial Disabilitas	Disabilitas

Sumber Daya Non Aparatur berbasis Masyarakat

Dinas Sosial juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah: kecamatan dan desa/kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan pendamping sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, lihat Tabel 3

SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat

No	Jenis SDM Berbasis Masyarakat	Kedudukan	Regulasi
1	Pendamping PKH	Kabupaten	UU No.11/2009
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	Kecamatan	Permensos N0.3/2013
3	Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	Permenos 15A/2010
4	Pendamping Sosial KUBe	Kelompok KUBe	UU No.13/2011
5	Pekerja Sosial Masyarakat/PSM	Desa/Kelurahan	Kepmensos No.28/1987
6	Pendamping KTK-PM	Desa/Kelurahan	Permensos No.83/2005
7	Taruna Siaga Bencana/Tagana	Kab danKec	Permensos No.29/2012
8	Pelopor Perdamaian	Kelompok/Desa	Permensos No.08/2012

Sumber: Bidang Bina Program (2018)

POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

NO	KECAMATAN	KODE JENIS PSKS *)												KET *)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	BUMBUAWA	21	5	10	0	18	0	40	0	0	0	1	15	1	Peksos Profesional
2	BALAPULANG	18	48	0	4	20	0	20	0	0	0	1	54	2	PSM
3	BOJONG	15	4	3	0	17	0	36	0	0	0	1	0	3	TAGANA
4	MARGASARI	10	24	0	2	13	0	43	0	173	0	1	25	4	LKS
5	PAGERBARANG	5	19	0	0	13	0	105	0	135	0	1	0	5	Karang Taruna
6	LEBAKSU	11	21	0	0	15	0	0	0	0	0	1	26	6	LK3
7	SLAWI	7	10	1	4	10	0	20	1	10	0	1	5	7	Keluarga Pioner
8	DUKUHWARU	8	10	0	0	10	0	10	0	0	0	1	20	8	WKSBM
9	ADIWERNA	10	4	1	4	21	0	0	0	0	0	1	8	9	WPKS
10	PANGKAH	11	23	0	2	23	0	0	0	0	0	1	1	10	Penyaluh
11	REDUNGSANTENG	7	10	1	0	10	0	100	0	68	0	1	6	11	TKSK
12	KRAMAT	7	20	0	1	20	0	0	0	0	0	1	20	12	Dunia Usaha
13	TALANG	8	49	1	0	1	0	66	0	54	8	1	15		
14	DUKUHTURI	7	38	1	1	18	0	0	0	0	0	1	45		
15	TARUB	14	4	0	1	17	0	244	0	84	13	1	3		
16	SURODADI	11	22	1	0	11	0	24	0	60	0	1	1		
17	WARUREJO	10	12	1	1	12	0	12	0	12	0	1	12		
18	JATINEGARA	10	8	0	1	17	1	21	0	15	0	1	4		
JUMLAH		190	331	20	21	206	1	741	1	611	21	10	260		

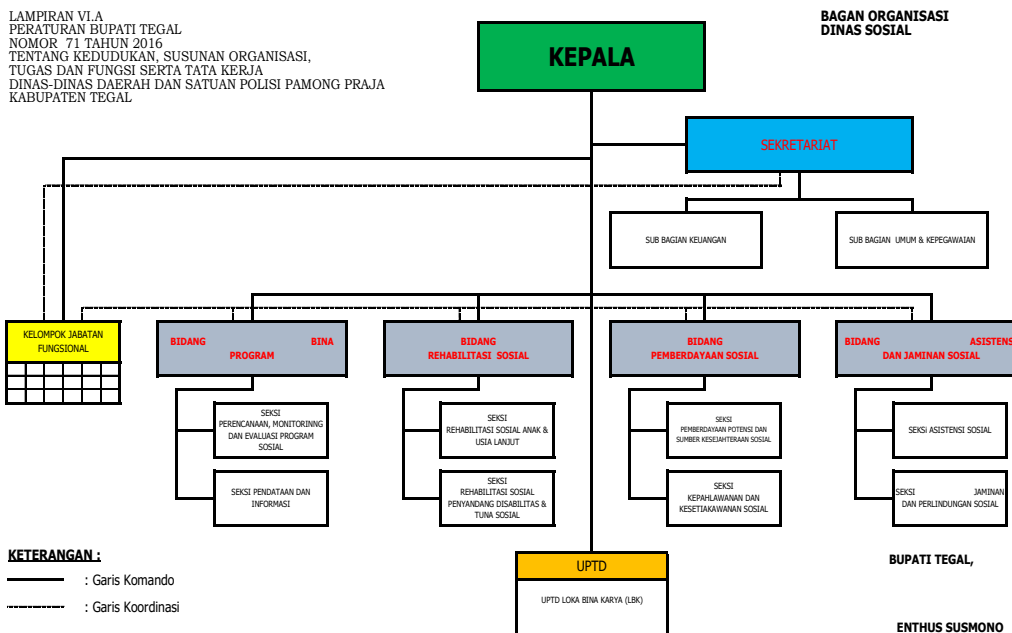
STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten tegal dan UPT Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas didukung oleh 2 Kepala Sub Bagian terdiri :
 - Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Program Sosial, didukung oleh 2 Kepala Seksi:
 - Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sosial.
 - Kepala Seksi Pendataan dan Informasi.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial didukung oleh 2 Kepala Seksi terdiri dari :
 - Kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lansia
 - Kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna social
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, didukung oleh 2 Kepala Sekasi, terdiri dari :
 - Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Kesejahteraan Sosial.
 - Kepala Seksi Pelestarian dan Kesetiakawanan Sosial.
- f. Bidang Assistensi dan Jaminan Sosial didukung oleh 2 (dua) Kepala Seksi terdiri dari :
 - Kepala Seksi Asistensi Sosial.
 - Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- g. Kepala UPTD Loka Bina Karya (LBK), didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha LBK

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar bagan sebagai berikut:



B. FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL

1. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tegal, maka Dinas Sosial Kabupaten Tegal secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : “Mewujudkan Pelayanan Sosial yang berkualitas dan Profesional menuju Kemandirian Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial” dengan melaksanakan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan dan Jaminan Sosial melalui lima misi yaitu Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial; Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara singkat mandat yang dipertanggungjawabkan Dinas Sosial Kabupaten Tegal, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
3. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.
4. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
6. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
7. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
8. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.
10. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Meningkatkan kualitas integrasi program dan penganggaran antar unit kerja yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Tegal yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
2. Tingginya mobilitas PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan.
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun *Stakeholders* belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

PEMETAAN SOSIAL KAB. TEGAL



Sumber : Hasil Pendataan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Catatan : TKSK dibentuk berdasarkan Permensos No 03 Tahun 2013



DINAS SOSIAL

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Kerangka Pikir Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesungguhnya telah berlangsung lama dalam masyarakat kita, jadi bukan sebuah fenomena baru. Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah mereformulasi dan mereaktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, namun memiliki tujuan sama. Nilai-nilai itu membentuk jati diri dan budaya bangsa. Nilai luhur bangsa tersebut antara lain: gotong royong, kesetiakawanan sosial, kepahlawanan, toleransi agama dan lainnya.

Nilai budaya bangsa inilah yang menjadi **fondasi** dari segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di atas fondasi itu diletakkan **landasan** Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial yang menjadi motor penggerak pembangunan sosial. Sumber daya itu terdiri dari para pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. SDM kesejahteraan sosial merupakan bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial menjadi agenda utama. Potensi lain yang dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial.

Apabila fondasi (nilai) dan landasan (SDM) itu terbina dengan baik, maka **pilar-pilar kokoh** yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial, yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Tugas lain ialah penanggulangan kemiskinan sebagai hasil karya kolaboratif berbagai Instansi yang menjadi salah

satu prioritas pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan.

Karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam kerangka kebijakan yang terpadu melibatkan segenap unsur pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha. Demi mencapai hasil optimal, intervensi kebijakan dilakukan berdasarkan segmen penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi aspek kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran, keterpencilan, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. Pada jangka waktu tertentu, bila segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berlangsung optimal, maka terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat bukan sekadar impian.

Kesejahteraan sosial tidak hanya dambaan warga yang tergolong PMKS, sebab seluruh warga masyarakat merasakan dampak buruk dari kehadiran PMKS, bila tidak tertangani secara efektif. Kondisi konflik, kerawanan, bahkan disintegrasi bangsa akan terjadi, jika agenda pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terabaikan. Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Tegal tidak akan bekerja sendirian. Berdasarkan UU Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang menginginkan ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban sosial diberikan kesempatan seluas- luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang merata akan membentuk ketahanan sosial yang kuat sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia.

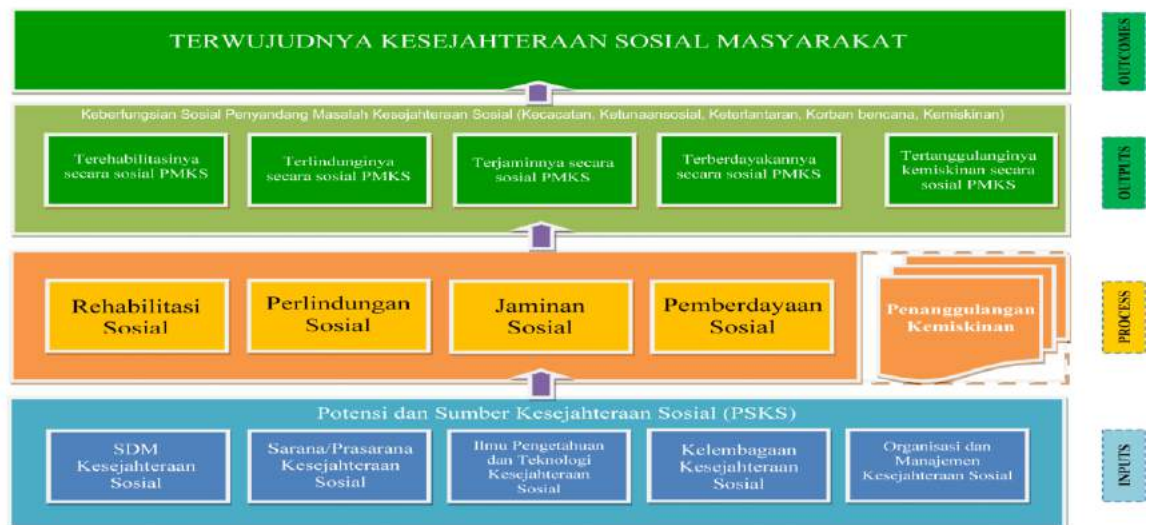
Inilah puncak dari seluruh upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di berbagai bidang dan wilayah kerja. Dalam bangunan kesejahteraan sosial yang dicita-citakan itu seluruh warga masyarakat akan bernaung dan berlindung, tidak hanya PMKS. Kementerian Sosial bertekad membangun rumah kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa diskriminasi.

Bangunan Kesejahteraan Sosial



Apabila bangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diilustrasikan dalam gambar diatas, maka konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial secara skematis digambarkan dalam bangunan kesejahteraan sosial gambar dan *frame work* penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bawah ini.

Framework penyelenggaraan kesejahteraan sosial





PEMBERDAYAAN SOSIAL



REHABILITASI SOSIAL

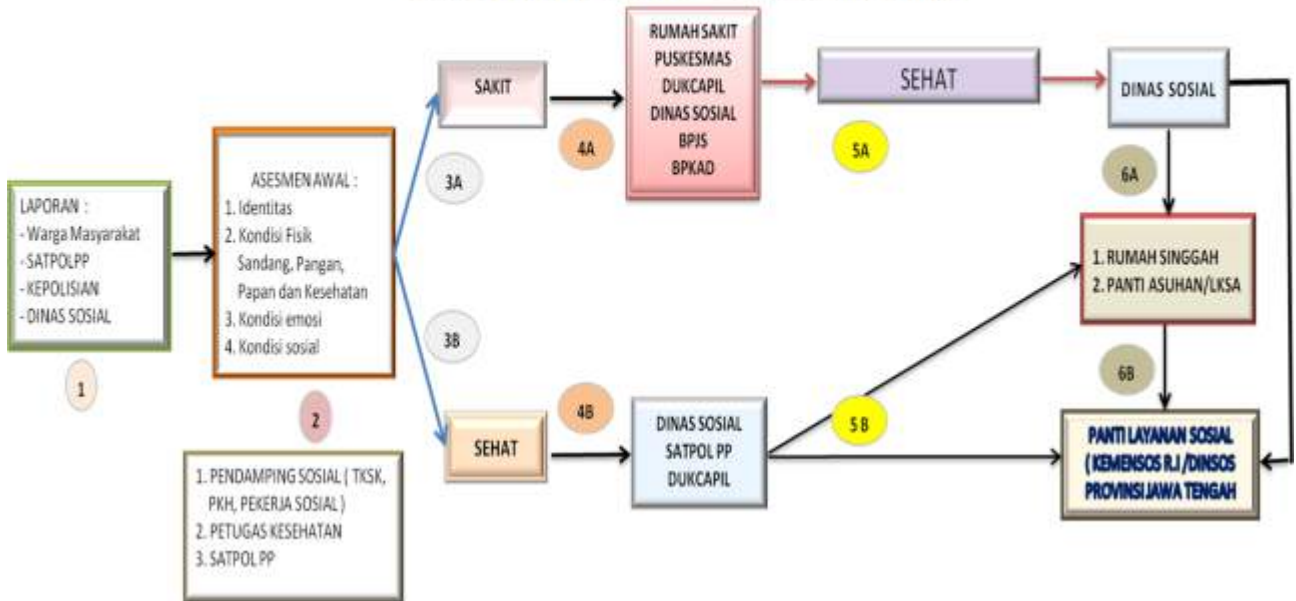


PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



ALUR PENANGANAN PGOT

ALUR PENANGANAN PGOT SESUAI PERBUP 75 TAHUN 2018



MEKANISME KERJA SLRT PENANGANAN KEMISKINAN



B. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2014–2019.

Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tegal. Oleh karena itu Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tegal menjadi satu kesatuan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Tegal “***Mewujudkan Pelayanan Sosial yang berkualitas dan Profesional menuju Kemandirian Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial***”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk mewujudkan kemandirian PMKS melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, termasuk melalui pemberdayaan dan penguatan PSKS dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 3 (Tiga) misi yakni:

- 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial;***
- 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam penyelenggraan kesejahteraan sosial;***
- 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.***

2. Tujuan

Pembentukan Visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tegal tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tegal yakni sebagai berikut:

1. MISI PERTAMA :

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan

TUJUAN:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.
- d. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- f. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
- g. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
- h. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
- i. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.

2. MISI KEDUA :

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

TUJUAN :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- d. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

3. MISI KETIGA :

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TUJUAN :

- a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. SASARAN

Dalam mencapai tujuan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tegal menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Rencana Strategis, yaitu :

- a. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat berkebutuhan khusus (Difabel)
- b. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan yang akan dicapai secara tahunan. Dalam mencapai sasaran strategis telah dirumuskan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja utama SKPD merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Dinas Sosial Kab. Tegal

5. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Prioritas pembangunan tahun 2018 yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam rangka menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja Dinas Sosial adapun prioritas pembangunan tersebut adalah penanggulangan kemiskinan

C. Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tegal kepada Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tegal untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini yang telah melaksanakan 16 program 52 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tegal sebesar **Rp. 4.960.000.000,-** (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

**PROGRAM DINAS SOSIAL
TAHUN 2018**

NO	Program / Kegiatan		Target Renstra 2019 (Rp.000)	Target 2018 (Rp.000)
1	2		3	4
I	Dinas Sosial		32.999.430.000	4.960.000.000
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.340.750.000	387.400.000
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	474.000.000	108.400.000
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.250.000	27.297.000
	3	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000	100.000.000
	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48.000.000	10.000.000
	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	5.000.000
	6	Penyediaan peralatan rumah tangga	35.000.000	10.000.000
	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.500.000	10.000.000
	8	Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000	26.000.000
	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	325.000.000	75.000.000
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.281.720.000	1.168.764.000
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		700.000.000
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	321.720.000	40.500.000
	3	Pengadaan Meubeler		36.664.000
	4	Pengadaan Perangkat Komputer, printer dan perlengkapannya		170.000.000
	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	325.000.000	106.,250.000
	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	550.000.000	180.000.000
	7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50.000.000	10.000.000
	8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.000.000	10.000.000
	9	Pemeliharaan Website SKPD	40.000.000	4.600.000

NO	Program / Kegiatan		Target Renstra 2019 (Rp.000)	Target 2018 (Rp.000)
1	2		3	4
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.500.000	25.000.000
		1 Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	15.000.000
	4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	205.000.000	69.000.000
		1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000	10.000.000
		2 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	180.000.000	36.850.000
		Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah		0
	5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	7.973.660.000	734.436.000
		1 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	100.000.000	
		2 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	689.150.000	145.000.000
		3 Pendampingan Program Keluarga Harapan	1.428.280.000	489.436.000
		4 Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin	500.000.000	100.000.000
		5 Operasional Penutupan Lokalisasi di Kab. Tegal	5.256.230.000	
	6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		20.000.000
		1 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		20.000.000
	7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.055.000.000	720.000.000
		1 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	175.000.000	30.000.000
		2 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	1.030.000.000	75.000.000
		3 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	200.000.000	50.000.000
		4 Penyuluhan peran serta masyarakat penanggulangan HIV/AIDS	250.000.000	
		5 Fasilitasi pendampingan alokasi bantuan sosial dan keagamaan	175.000.000	
		6 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	250.000.000	
		7 Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah, Pencatatan Nikah dan Pencatatan Kelahiran	375.000.000	
		8 Penyediaan Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu/Keluarga Miskin/Living cost		150.000.000

NO	Program / Kegiatan		Target Renstra 2019 (Rp.000)	Target 2018 (Rp.000)
1	2		3	4
	9	Pelayanan dan pengaduan Masyarakat		15.000.000
	10	Verifikasi Data Kemiskinan	600.000.000	300.000.000
	8	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan		100.000.000
	1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan		100.000.000
	9	Program pembinaan anak terlantar	250.000.000	45.000.000
	1	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	250.000.000	45.000.000
	10	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1.086.400.000	385.000.000
	1	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	795.400.000	300.000.000
	2	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	291.000.000	75.000.000
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Asrama UPTD LBK		10.000.000
	11	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	949.400.000	100.000.000
	1	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	250.000.000	-
	2	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	449.400.000	50.000.000
	3	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	250.000.000	50.000.000
	12	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	425.000.000	460.000.000
	1	Pendampingan Sosial bagi Eks Tuna Susila (WTA, PGOT, Eks WTS, Narkoba, ODHA)	425.000.000	60.000.000
	2	Pendampingan dampak Penutupan Lokalisasi		275.000.000
	13	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		63.000.000
	1	Pemeliharaan Areal Pemakaman		63.000.000
	14	Program Pembinaan dan Pemaasyarakatan Olah Raga		75.000.000
	1	Pengembangan Olah Raga lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat		75.000.000
	15	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	16.345.000.000	521.000.000
	1	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial	2.000.000.000	391.000.000
	2	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	1.875.000.000	-

NO	Program / Kegiatan		Target Renstra 2019 (Rp.000)	Target 2018 (Rp.000)
1	2		3	4
	3	Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	300.000.000	80.000.000
	4	Pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha kesejahteraan sosial	170.000.000	50.000.000
	16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		72.000.000
	1	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja		10.000.000
	2	Penyelenggaraan Forum SKPD		12.000.000
	3	Revie Renstra SKPD		-
	4	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Program Sosial		40.000.000

Penetapan kinerja telah mengacu pada renstra 2014-2018 dalam dokumen Penetapan Kinerja 2018, ditetapkan target indikator.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan Bupati Tegal Tahun 2018, secara lengkap tercantum pada tabel dibawah ini.

**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA,
TARGET KINERJA DAN PROGRAM DINAS SOSIAL
TAHUN 2018**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM
1	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Jumlah PMKS yang diberdayakan	100,00	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
		Persentase PMKS ditangani	30,00	
		Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	250,00	
		Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	7,5	
		Jumlah lansia terlantar yang di tangani	90,00	
		Persentase lansia terlantar yang ditangani	11,5	
		Jumlah PMKS direhabilitasi sosial	425	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30,00	
		Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi	225	
		Persentase korban bencana yang ditangan	100%	
		Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	350,00	Program pembinaan anak terlantar
		Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	13,80	
		Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	275	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
		Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	6,5	
		Jumlah pengidap narkoba yang ditangani	35	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
		Persentase pengidap narkoba yang ditangani	11,5	

		Jumlah pengidap PMS yang ditangani	75,00	penyakit sosial lainnya)
		Persentase pengidap PMS yang ditangani	6,00	
		Jumlah pengidap HIV/AIDS yang ditangani	25	
		Persentase pengidap HIV/AIDS yang ditangani	7	
		Jumlah eks WTS yang diberdayakan	350,00	
		Persentase eks WTS yang diberdayakan	8,6	
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah panti asuhan/panti jompo	21,00	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
		Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	21,00	
		Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	250,00	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

Rencana capaian kinerja program dan kegiatan dari sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel), melalui Program :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
 - 1) Jumlah PMKS yang diberdayakan, target capaian 100 Orang
 - 2) Prosentase PMKS yang diberdayakan, target capaian 30 %
 - 3) Jumlah Perintis Kemerdekaan / Warakawuri dan Veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial, target capaian 250 orang
 - 4) Prosentase Perintis Kemerdekaan / Warakawuri dan Veteran pejuang yang

- mendapat pelayanan sosial, target capaian 7,5 %
- 5) Jumlah Lansia terlantar yang ditangani, target capaian 90 Orang
 - 6) Prosentase Lansia yang ditangani, target capaian 11,5 %
- b. Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
- 1) Jumlah PMKS yang direhabilitasi Sosial, target capaian 142. Orang
 - 2) Prosentase PMKS yang direhabilitasi, target capaian 30 %
 - 3) Jumlah Korban Bencana yang di evakuasi, target capaian 100 orang
 - 4) Prosentase Korban Bencana yang di tangani, target capaian 34,50 %
- c. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
- 1) Jumlah Anak terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi Sosial, target capaian 350 Org
 - 2) Prosentase Anak terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi Sosial, target capaian 13,80 %
- d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
- 1) Jumlah Penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi Sosial, target capaian 250 Orang
 - 2) Prosentase Penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi Sosial, target capaian 6,5 %
- e. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
- 1) Jumlah Pengindap Narkoba yang ditangani, target capaian 35 orang
 - 2) Prosentase Pengindap Narkoba yang ditangani, target capaian 13 %

- 3) Jumlah Pengindap PMS yang ditangani, target capaian 125 orang
- 4) Prosentase Pengindap PMS yang ditangani, target capaian 6 %
- 5) Jumlah Pengindap HIV / AIDS yang ditangani, target capaian 30 orang
- 6) Prosentase Pengindap HIV / AIDS yang ditangani, target capaian 7 %
- 7) Jumlah eks WTS yang ditangani, target capaian 350 orang
- 8) Prosentase eks WTS yang ditangani, target capaian 8,6 %

2. Sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Rencana capaian kinerja program dan kegiatan dari sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, melalui Program

- a. Program Pembinaan Panti Asuhan, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
 - 1) Jumlah Panti Asuhan, target capaian 21 Panti
 - 2) Jumlah Panti Asuhan yang di bina, target capaian 21 Panti
- b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
 - 1) Jumlah Kelompok Peduli Kesejahteraan Sosial yang dibina, target capaian 250 Orang
 - 2) Prosentase Kelompok Peduli Kesejahteraan Sosial yang dibina



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. IKHTISAR CAPAIAN KINERJA 2018

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra OPD Dinas Sosial.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:

- 1). Semakin tinggi Realisasi menunjukkan Pencapaian Kinerja yang semakin baik, maka digunakan Rumus :

Realisasi	X 100 %
Rencana	

2). Semakin tinggi Realisasi menunjukkan Pencapaian Kinerja yang semakin Rendah, maka digunakan Rumus :

Rencana – (Realisasi-Rencana)	X 100 %
Rencana	

berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dikelompokkan dalam 6 kategori yaitu:

- memuaskan** >85-100
- sangat baik** >75-85%,
- baik** >65 - 75%,
- cukup** > 50 - 65 %,
- kurang** >0-50 %,
- sangat kurang**>0-30%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja OPD Dinas Sosial Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian kinerja OPD Dinas Sosial adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dapat disimpulkan bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis OPD Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2018 adalah:

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN
1	Meningkatkan PMKS dalam kehidupan yang layak dan keberfungsian social	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	99,5 %
2	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%

Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

3.1

Perbandingan Target 2018 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMAA	2018		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Jumlah PMKS yang ditangani	175,00	175,00	100 %
		Persentase PMKS ditangani	30,50	30,50	100%
		Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	300,00	300,00	100 %
		Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	7,52	7,5	100 %
		Jumlah lansia terlantar yang di tangani	175	175	100 %
		Persentase lansia terlantar yang ditangani	11,5	11,5	100 %
		Jumlah PMKS direhabilitasi sosial	450	450	100%
		Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30,00	29,00	96,42
		Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi	430	425	96%
		Persentase korban bencana yang ditangan	100,00	100,00	100 %
		Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450,00	450,00	100 %
		Persentase anak terlantar, anak jelanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	13,80	13,11,00	100 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMAA	2018		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
		Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	250,00	250,00	100 %
		Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	5,8	5,8	100 %
		Jml pengidap narkoba yg ditangani	65,00	65,00	40,00
		Persentase pengidap narkoba yang ditangani	13,5	11,5	85 %
		Jml pengidap PMS yang ditangani	125,00	110,00	96 %
		Persentase pengidap PMS yang ditangani	6	6	92,98 %
		Jumlah pengidap HIV/AIDS yang ditangani	30,00	30,00	100 %
		Persentase pengidap HIV/AIDS yang ditangani	7	7	100 %
		Jumlah eks WTS yang diberdayakan	350,00	423	120 %
		Persentase eks WTS yang diberdayakan	8,6	8,6	118 %
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah panti asuhan /Jompo	21,00	21,00	100 %
		Jumlah panti asuhan yang dibina	21,00	21,00	100 %
		Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	250,00	250,00	100 %
		Prosentase kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	7,2	7,2	App

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dengan realisasi dan Capaian tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMAA	2016			2017			2018		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Jumlah PMKS yang ditangani	100	100	100 %	100,00	100,00	100 %	175,00	175,00	100 %
		Persentase PMKS ditangani	26	26	100%	28,00	27,50	98,2 %	30,50	30,50	100%
		Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	150	150	100 %	250,00	250,00	100 %	300,00	300,00	100 %
		Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	8,2	8,2	100 %	6,2	6,2	100 %	7,52	7,5	100 %
		Jumlah lansia terlantar yang di tangani	70	70	100 %	50,00	50,00	100 %	175	175	100 %
		Persentase lansia terlantar yang ditangani	12,5	12,5	100 %	10,2	10,2	100 %	11,5	11,5	100 %
		Jumlah PMKS direhabilitasi sosial	350	350	100%	425	425	100%	450	450	100%
		Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30,00	29	96,42	28,00	27,00	96,42	30,00	30,00	96,42
		Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi	100	100	100	421	421	100%	430	425	96%
		Persentase korban bencana yang ditangan	100	100	100 %	100,00	100,00	100 %	100	100	100 %
		Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450,00	450	100 %	100,00	100,00	100 %	450,00	450	100 %
		Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	12,50	12,50	100 %	28,00	27,50	98,2 %	13,80	13,11,0	100 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2016			2017			2018		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
		Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	150,00	150,00	100 %	250,00	250,00	100 %	250,00	250,00	100 %
		Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	4,8	4,8	100 %	5,2	5,2	100 %	5,8	5,8	100 %
		Jml pengidap narkoba yg ditangani	65,00	65,00	40,00	40,00	40,00	40,00	65,00	65,00	40,00
		Persentase pengidap narkoba yang ditangani	12,5	10,5	85 %	12,5	12	97,5 %	13,5	11,5	85 %
		Jml pengidap PMS yang ditangani	100	100	96 %	125,00	120,00	96 %	125,00	110,00	96 %
		Persentase pengidap PMS yang ditangani	4,6	4,0	92,98 %	5,7	5,3	92,98 %	6	5,4	92,98 %
		Jumlah pengidap HIV/AIDS yang ditangani	30,00	30,00	100 %	30,00	30,00	100 %	30,00	30,00	100 %
		Persentase pengidap HIV/AIDS yang ditangani	5	5	100 %	6,2	6,1	98,38 %	7	7	100 %
		Jumlah eks WTS yang diberdayakan	200	200	100 %	350,00	423	120 %	350,00	423	120 %
		Persentase eks WTS yang diberdayakan	4,6	4,6	118 %	7,2	8,5	118 %	8,6	8,6	118 %
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah panti asuhan /Jompo	21,00	21,00	100 %	21,00	21,00	100 %	21,00	21,00	100 %
		Jumlah panti asuhan yang dibina	21,00	21,00	100 %	21,00	21,00	100 %	21,00	21,00	100 %
		Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	150,00	150,00	100 %	250,00	250,00	100 %	250,00	250,00	100 %
		Prosentase kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	7,2	7,2	App	7,2	7,0	100 %	7,2	7,2	App

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target Akhir Renstra Tahun 2018 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2018 dengan Realisasi
Anggaran Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2018		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Jumlah PMKS yang ditangani	175,00	175,00	100 %
		Persentase PMKS ditangani	30,50	30,50	100%
		Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	300,00	300,00	100 %
		Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	7,52	7,5	100 %
		Jumlah lansia terlantar yang di tangani	175	175	100 %
		Persentase lansia terlantar yang ditangani	11,5	11,5	100 %
		Jumlah PMKS direhabilitasi sosial	450	450	100%
		Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30,00	30,00	96,42
		Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi	430	425	96%
		Persentase korban bencana yang ditangan	100	100	100 %
		Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450,00	450	100 %
		Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	13,80	13,11,0	100 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMAA	2018		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
		Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	250,00	250,00	100 %
		Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	5,8	5,8	100 %
		Jml pengidap narkoba yg ditangani	65,00	65,00	40,00
		Persentase pengidap narkoba yang ditangani	13,5	11,5	85 %
		Jml pengidap PMS yang ditangani	125,00	110,00	96 %
		Persentase pengidap PMS yang ditangani	6	5,4	92,98 %
		Jumlah pengidap HIV/AIDS yang ditangani	30,00	30,00	100 %
		Persentase pengidap HIV/AIDS yang ditangani	7	7	100 %
		Jumlah eks WTS yang diberdayakan	350,00	423	120 %
		Persentase eks WTS yang diberdayakan	8,6	8,6	118 %
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah panti asuhan /Jompo	21,00	21,00	100 %
		Jumlah panti asuhan yang dibina	21,00	21,00	100 %
		Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	250,00	250,00	100 %
		Prosentase kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	7,2	7,2	App

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2018		
			TARGET	TINGKAT CAPAIAN	standar nasional
1	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Jumlah PMKS yang ditangani	175,00	100 %	
		Persentase PMKS ditangani	30,50	100%	
		Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	300,00	100 %	
		Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	7,52	100 %	
		Jumlah lansia terlantar yang di tangani	175	100 %	
		Persentase lansia terlantar yang ditangani	11,5	100 %	
		Jumlah PMKS direhabilitasi sosial	450	100%	
		Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30,00	96,42	
		Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi	430	96%	
		Persentase korban bencana yang ditangan	100	100 %	
		Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450,00	100 %	
		Persentase anak terlantar, anak jelanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	13,80	100 %	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2018		
			TARGET	REALISASI	
		Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	250,00	250,00	
		Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	5,8	5,8	
		Jml pengidap narkoba yg ditangani	65,00	65,00	
		Persentase pengidap narkoba yang ditangani	13,5	11,5	
		Jml pengidap PMS yang ditangani	125,00	110,00	
		Persentase pengidap PMS yang ditangani	6	6	
		Jumlah pengidap HIV/AIDS yang ditangani	30,00	30,00	
		Persentase pengidap HIV/AIDS yang ditangani	7	7	
		Jumlah eks WTS yang diberdayakan	350,00	423	
		Persentase eks WTS yang diberdayakan	8,6	8,6	
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah panti asuhan /Jompo	21,00	21,00	
		Jumlah panti asuhan yang dibina	21,00	21,00	
		Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	250,00	250,00	
		Prosentase kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	7,2	7,2	

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Rata-rata capaian sasaran sebesar 95,20 % karena didukung oleh capaian indikator:

- 1) Target Indikator Kinerja Jumlah PMKS yang diberdayakan pada tahun 2018, adalah 175 Orang dan capaiannya 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Tercapaiunya indikator ini karena didukung oleh Program Pemberdayaan sosial, kegiatan pelatihan PMKS
- 2) Target Indikator Kinerja Jumlah Perintis Kemerdekaan / Warakawuri dan Veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial, target capaian 300 orang, Realisasi Capaian Kinerja 300 Prosentase Capaian Kinerja 100 %. Tercapaiunya indikator ini karena didukung oleh Program Pemberdayaan sosial, kegiatan Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kesetiakawanan sosial.
- 3) Target Indikator Kinerja Jumlah Lansia terlantar yang ditangani, target capaian 175 Orang, Realisasi Capaian Kinerja 175, Prosentase Capaian Kinerja 100 % Tercapaiunya indikator ini karena didukung oleh Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial, melalui kegiatan Penanganan Lansia Terlantar.
- 4) Target Indikator Kinerja Jumlah PMKS yang direhabilitasi Sosial, target capaian 450 Orang, Realisasi Capaian Kinerja 450 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 100 %, Tercapaiunya indikator ini karena didukung oleh Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- 5) Target Indikator Kinerja Jumlah Korban Bencana yang di evakuasi, target capaian 430 orang, Realisasi Capaian Kinerja 325 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 96,42%, Tercapaiunya indikator ini karena didukung oleh Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan Peberian Bantuan dan Tanggap Daerurat.

- 6) Target Indikator Kinerja Jumlah Anak terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi Sosial, target capaian 450 Orang , Realisasi Capaian Kinerja 450 Prosentase Capaian Kinerja 100 %, Tercapainya indikator ini karena didukung oleh Program Pembinaan Anak Terlantar, melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Anak terlantar.
- 7) Target Indikator Kinerja Jumlah Penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi Sosial, target capaian 250 Orang , Realisasi Capaian Kinerja 250 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 100 %, Tercapainya Indikator ini didukung oleh Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma, melalui pelatihan keterampilan Penyandang Disabilitas.
- 8) Target Indikator Kinerja Jumlah Pengindap Narkoba yang ditangani, target capaian 65 orang, Realisasi Capaian Kinerja 60 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 92,30 %. Tercapainya Indikator ini didukung oleh Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- 9) Target Indikator Kinerja Jumlah Pengindap PMS yang ditangani, target capaian 125 orang, Realisasi Capaian Kinerja 110 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 88 %. Tercapainya Indikator ini didukung oleh Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) melalui kegiatan Pembinaan dan pengiriman klien ke Balai Rehabsos.
- 10) Target Indikator Kinerja jumlah Pengindap HIV / AIDS yang ditangani, target capaian 30 orang, Realisasi Capaian Kinerja 30 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 100 %. Tercapainya Indikator ini didukung oleh Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) melalui kegiatan pembinaan dan pengiriman klien ke Balai Rehabsos.

- 11) Target Indikator Jumlah eks WTS yang ditangani, target capaian 175 orang, Realisasi Capaian Kinerja 175 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 100 %. Tercapainya Indikator ini didukung oleh Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan dan pengiriman klien ke Balai Rehabsos.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daa

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap 2 tujuan sasaran yaitu: yaitu :

- 1) Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat berkebutuhan khusus (Difabel), Sasaran ini dicapai melalui 5 program dan 11 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.645.752.832 dari anggaran Rp. 2.730.436.000,- atau 96,89 % sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 3,10 % dan penggunaan sumberdaya manusia 21 orang atau 100% dari rencana 21 orang.

Rincian penggunaan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia dapat

- 2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sasaran ini dicapai melalui 2 program dan 2 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 603.085.000,- dari anggaran Rp. 611.000,- atau 98,70 % sehingga terdapat efisiensi dana sebesar 1,3 % dan penggunaan sumberdaya manusia 21 orang atau 100% dari rencana 21 orang.

Rincian penggunaan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia dapat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM
1	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Jumlah PMKS yang diberdayakan	100,00	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
		Persentase PMKS ditangani	30,00	
		Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	250,00	
		Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	7,5	
		Jumlah lansia terlantar yang ditangani	90,00	
		Persentase lansia terlantar yang ditangani	11,5	
		Jumlah PMKS direhabilitasi sosial	425	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30,00	
		Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi	225	
		Persentase korban bencana yang ditangan	100%	
		Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	350,00	Program pembinaan anak terlantar
		Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	13,80	
		Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	275	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
		Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	6,5	
		Jumlah pengidap narkoba yang ditangani	35	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Persentase pengidap narkoba yang ditangani	11,5			
Jumlah pengidap PMS yang ditangani	75,00			

		Persentase pengidap PMS yang ditangani	6,00	
		Jumlah pengidap HIV/AIDS yang ditangani	25	
		Persentase pengidap HIV/AIDS yang ditangani	7	
		Jumlah eks WTS yang diberdayakan	350,00	
		Persentase eks WTS yang diberdayakan	8,6	
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah panti asuhan/panti jompo	21,00	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
		Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	21,00	
		Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	250,00	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja

Berdasarkan pernyataan kinerja tahun 2018 OPD telah berkomitmen untuk mencapai 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD/Renstra. Pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (PEREMPUAN, ANAK, KORBAN BENCANA, PENYAKIT MASYARAKAT) PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL) DAN MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS (DIFABEL)
------------------	--

Sasaran Strategi 1 yaitu Meningkatkan Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

Capaian kinerja program dan kegiatan dari sasaran Meningkatkan Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat

Berkebutuhan Khusus (Difabel), melalui Program :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

12) Jumlah PMKS yang diberdayakan, target capaian 175 Orang, Realisasi Capaian Kinerja 175, Prosentase Capaian Kinerja 100%

13) Prosentase PMKS yang diberdayakan, target capaian 30,50 %, Realisasi

Capaian Kinerja 30,50 %, Prosentase Capaian Kinerja 100 %

- 14) Jumlah Perintis Kemerdekaan / Warakawuri dan Veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial, target capaian 300 orang, Realisasi Capaian Kinerja 300 Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 15) Prosentase Perintis Kemerdekaan / Warakawuri dan Veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial, target capaian 6,2 %, Realisasi Capaian Kinerja 6,2 %, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 16) Jumlah Lansia terlantar yang ditangani, target capaian 175 Orang, Realisasi Capaian Kinerja 175, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 17) Prosentase Lansia yang ditangani, target capaian 11,5 %, Realisasi Capaian Kinerja 11,5%, Prosentase Capaian Kinerja 100 %

Kegiatan–kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Utama tersebut pada tahun 2018 yaitu melalui :

- 42 orang lansia terlantar dikirim ke Baresos Brebes dan Pemalang
- 133 orang lansia terlantar tidak mau dirujuk ke Baresos karena alasan keluarga.,

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 18) Jumlah PMKS yang direhabilitasi Sosial, target capaian 450 Orang, Realisasi Capaian Kinerja 450 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 19) Prosentase PMKS yang direhabilitasi, target capaian 30 %, Realisasi Capaian Kinerja 30 %, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 20) Jumlah Korban Bencana yang di evakuasi, target capaian 430 orang, Realisasi Capaian Kinerja 325 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 96,42%
- 21) Prosentase Korban Bencana yang di tangani, target capaian 100 %, Realisasi Capaian Kinerja 100 %, Prosentase Capaian Kinerja 100 %

c. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anak terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi Sosial, target capaian 450 Orang , Realisasi Capaian Kinerja 450 Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 2) Prosentase Anak terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi Sosial, target capaian 13,80 % , Realisasi Capaian Kinerja 13,80 % , Prosentase Capaian Kinerja 100 %

Kegiatan–kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- Pelatihan ketrampilan Budidaya Pertanian / Penanaman Jahe bagi 25 anak Panti Asuhan
- Pelatihan Keterampilan Teknisi HP terhadap 60 Anak Terlantar, Termasuk Anak Jalanan
- 25 anak pelatihan menjahit, 25 anak pelatihan montir, anak pelayanan sosial di Baresos Putra harapan Slawi, 40 anak pelayanan sosial di Baresos Wira Adi Karya Ungaran, 21 anak pelayanan sosial di Sukomulyo Tegal, 2 anak berhadapan dengan hukum dikirim ke Panti Sosial Marsudi Putra Magelang,

d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma, dengan capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Jumlah Penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi Sosial, target capaian 250 Orang , Realisasi Capaian Kinerja 250 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 2) Prosentase Penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi Sosial, target capaian 5,8 % , Realisasi Capaian Kinerja 5,8 % , Prosentase Capaian Kinerja 100 %

Kegiatan–kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator

kinerja Utama tersebut pada tahun 2018 yaitu melalui :

- Pelatihan Keterampilan Penyandang cacat, yang di selenggarakan di Loka Bina Karya sejumlah 60 peserta, dengan jenis Pelatihan Menjahit, Service HP dan Anyaman Bambu.
- Pemberdayaan 5 Orang Difabel sebagai Pendamping program Pembinaan dan Pendataan Difabel
- Bantuan Alat Kesehatan bagi 32 Difabel, berupa alat bantu disabilitas (kaki palsu 20 buah dan 12 kursi roda),
- Pelatihan keterampilan 6 orang difabel di Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa Temanggung.
- Pembinaan terhadap Anggota Difabel Mandiri
- Mengadakan Pentas Seni dan Karnaval Tigkat Kab. Tegal: 265 Orang
- Pentas Seni/Pameran Tingkat Provinsi Jateng : 20 Orang









e. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Jumlah Pengindap Narkoba yang ditangani, target capaian 65 orang, Realisasi Capaian Kinerja 60 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 92,30 %
- 2) Prosentase Pengindap Narkoba yang ditangani, target capaian 12,5 %, Realisasi Capaian Kinerja 11,5 %, Prosentase Capaian Kinerja 92,5 %
- 3) Jumlah Pengindap PMS yang ditangani, target capaian 125 orang, Realisasi Capaian Kinerja 110 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 88 %
- 4) Prosentase Pengindap PMS yang ditangani, target capaian 6,7 %, Realisasi Capaian Kinerja 5,3 %, Prosentase Capaian Kinerja 92,98 %

- 5) Jumlah Pengidap HIV / AIDS yang ditangani, target capaian 30 orang, Realisasi Capaian Kinerja 30 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 6) Prosentase Pengidap HIV / AIDS yang ditangani, target capaian 7 %, Realisasi Capaian Kinerja 7 %, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 7) Jumlah eks WTS yang ditangani, target capaian 175 orang, Realisasi Capaian Kinerja 175 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 8) Prosentase eks WTS yang ditangani, target capaian 8,6%, Realisasi Capaian Kinerja 8,6 %, Prosentase Capaian Kinerja 100 %

Kegiatan–kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- Menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan, tata rias dan tata boga, design grafis dan montir sepeda motor untuk 536 WTS dan 360 warga terdampak, pemulangan 296 wts ke daerah subang, garut, ciamis, kuningan, banjarnegara, semarang, magelang, boyolali, jepara dan wonosobo, rakor forum peduli disabilats : 80 orang
- Pelatihan tata boga bagi 40 orang wrse di kec. Margasari
- Pelatihan handycraf bagi 40 orang di ds. Muncang larang dan rembul Kec. Bojong
- Pelatihan montir sepeda motor bagi 20 orang KRSE di ds. Kalisapu kec. Slawi kab. Tegal.
- Pelatihan montir sepeda motor bagi 20 orang KRSE di ds. Tegalwangi kec. Adiwerna kab. Tegal.
- Pengiriman PGOT, WTS dan Eks WTS, ODHA ke Panti Sosial 560 orang
- Pengiriman 62 eks psykotik ke RSJ Magelang dan 15 PGOT ke Baresos Sameko Karti Pemalang, 5 orang pengidap Narkoba mengikuti bimbingan dari Dinas Sosial Provinsi Jateng dan mendapat bantuan UEP. 10 orang pengidap HIV / AIDS yang direhabilitasi dan mendapat bantuan nutrisi.
- 40 orang yang direhabilitasi dan mendapatkan UEP dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dari jumlah pengidap Napza tahun 2018 sebanyak 42 orang.

- Pengiriman PGOT, WTS dan Eks WTS, ODHA ke Panti Sosial 560 orang
- Bimbingan Teknis (BIMTEK) KUBE Fakir Miskin sejumlah 30 Orang



SASARAN 2	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
------------------	---

Sasaran Strategi ke 2 yaitu Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dicapai melalui Program

a. Pembinaan Panti Asuhan, dengan capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Jumlah Panti Asuhan, target capaian 21 Panti, Realisasi Capaian Kinerja 21 Panti, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 2) Jumlah Panti Asuhan yang di bina, target capaian 21 Panti , Realisasi Capaian Kinerja 21 Panti, Prosentase Capaian Kinerja 100 %

b. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Jumlah Kelompok Peduli Kesejahteraan Sosial yang dibina, target capaian 250 Orang, Realisasi Capaian Kinerja 250 Orang, Prosentase Capaian Kinerja 100 %
- 2) Prosentase Kelompok Peduli Kesejahteraan Sosial yang dibina, target capaian 7,2%, Realisasi Capaian Kinerja 7,2 %, Prosentase Capaian Kinerja 100 %

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik secara perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing.

Kegiatan–kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

a. Pembinaan terhadap LK3

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga atau Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian / penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar – benar mampu mencegah masalah secara lebih intensif.

Maksud Pembinaan terhadap LK3 adalah sebagai upaya untuk mengarahkan LK3 agar mampu mengoptimalkan kemampuan dan perannya sebagai *centre link* dalam penyelenggaraan pelayanan konsultasi kesejahteraan sosial keluarga.

Di Kabupaten tegal baru terbentuk 1 LK3, Sasaran LK3 adalah keluarga

yang membutuhkan informasi dan advokasi untuk pengembangan kualitas keluarga, keluarga yang membutuhkan bantuan dalam menangani masalah bio psikososial keluarga dan individu, kelompok, institusi, organisasi yang karena kepedulian, kepentingan atau tugasnya untuk mengatasi masalah keluarga.

Pembinaan terhadap LK3 dilaksanakan melalui kegiatan

- Pertemuan LK3 yang melibatkan pengurus LK3

b. Pembinaan terhadap Organisasi Sosial (Orsos)

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya dan Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2018, jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang telah terdaftar dan diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial, serta yang telah menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebanyak 21 LKSA.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan :

- 1) Pertemuan Rutin melalui Forum Komunikasi LKSA
- 2) Bantuan Sarana dan Prasarana LKSA, berupa Sarana Perkantoran LKSA, ke 21 LKSA
- 3) Proses Pengakreditasi LKSA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pelatihan manajemen Pengelolaan LKSA
 - 1) Kegiatan Bimbingan manajemen bagi pengurus ORSOS yang dilaksanakan di Provinsi, kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan

bantuan kelembagaan.



Wakil Bupati Tegal Dra. Hj Umi Azizah, menyerahkan Sertifikat Akreditasi LKSA secara Simbolis kepada Drs. Miftah selaku Ketua Forum LKSA Kabupaten Tegal

2) Pertemuan Jejaring Organisasi Sosial

c. Pembinaan terhadap Karang Taruna (KT)

Karang taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, generasi muda di wilayah desa dan kelurahan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Keorganisasian karang taruna berada di desa/kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh warga karang taruna setempat.



Pembinaan terhadap KT dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan pengembangan kapasitas terhadap KT yang dilaksanakan di Kabupaten, kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan kelembagaan.
 - 2) Kegiatan Pemantapan Tenaga Inti Karang Taruna (TIKAR)
- d. Pembinaan terhadap Forum CSR (FCSR)

CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga / wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan difasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam rangka mensinergikan peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial maka diperlukan forum koordinasi, perencanaan, kajian dan evaluasi, pengembangan sistem informasi yang disebut forum tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (forum CSR kesos).

Peran Forum CSR Kesejahteraan Sosial, yaitu :

- 1) Mensinergikan program perusahaan dan pemerintah yang seiring.
 - 2) Mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan masyarakat.
 - 3) Memberikan gambaran rencana kerja pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik.
- 3) Memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dua arah, agar kemungkinan kerjasama menjadi terbuka, sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara program perusahaan dan pemerintah.

Pembinaan terhadap FCSR dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan pemantapan program peningkatan kemitraan dunia usaha.
 - 2) Koordinasi Lembaga CSR Kabupaten Tegal dengan Lembaga CSR Provinsi Jawa Tengah
- e. Pembinaan terhadap Pekerja Sosial Masyarakat

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah merupakan salah satu sumber penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PSM sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan dibidang kesejahteraan sosial. Ikatan PSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai median

koordinasi, konsultasi, petukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis dibidang kesejahteraan sosial.

PSM dibentuk dengan maksud meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembinaan terhadap Pekerja Sosial Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Kegiatan Bimbingan sosial dasar PSM melalui Rapat Koordinasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial



Kepala Dinas Sosial Dra. Nurhayati, MM, memberikan Arahan dan bimbingan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kab. Tegal selaku Pilar PSKS

- f. Pembinaan terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tingkat Kecamatan.

Tugas TKSK adalah melaksanakan; identifikasi dan inventarisasi PMKS dan PSKS; bimbingan dan penyuluhan sosial; pengembangan jejaring dan koordinasi dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pembinaan terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Kegiatan pemantapan TKSK dan Rapat Koordinasi dengan TKSK
- b. Pemberian Intensif terhadap TKSK selama 12 bulan.



Keberhasilan sasaran Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial didukung oleh kegiatan yang alokasi anggarannya dari APBN maupun APBD Provinsi, diantaranya melalui Program Kegiatan :

1. Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH)
2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Bantuan Beras Sejahtera (Rastra)
3. Bantuan Modal Usaha keluarga Miskin (KUBE)
4. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Profinsi
5. Program Kartu Sejahterara Jateng
6. Target Indikator kinerja Utama Jumlah fakir miskin yang telah mengakses fasilitas pelayanan dasar pada Tahun 2018 sebesar 58.000 Keluarga Fakir Miskin yang dicapai melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan yaitu Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

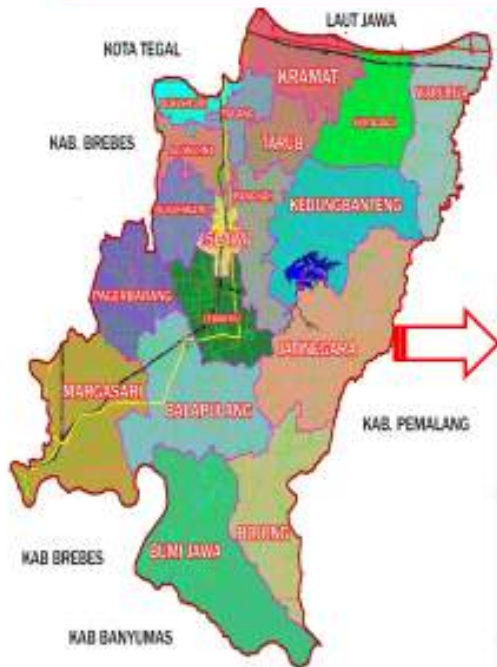
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Program Prioritas Nasional untuk pencaaian target RPJMN 2010-2014 dan mempercepat pencapaian target MDGs dengan fokus yaitru : keluarga fakir miskin dapat mengakses pelayanan kesehatannya bagi anggota keluarganya terutama bagi ibu hamil dan anak balita, serta dapat mengakses pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala

 SEBARAN KEPESERTAAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN KELUARGA MISKIN SEBARAN JAMINAN SOSIAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017							
NO	KECAMATAN	JENIS PROGRAM BANTUAN					
		PBI JKN APBN	PBI JKN APBD I	PBI JKN APBD II	RASTRA	KJS	PKH
1	BUMIJAWA	63.130	434	1.151	7.879	10	6.410
2	BALAPULANG	63.129	1.138	871	7.364	107	5.688
3	BOJONG	55.727	956	1.284	6.279	20	4.727
4	MARGASARI	59.150	642	2.088	6.259	144	4.223
5	PAGERBARANG	19.207	824	1.114	2.456	20	1.575
6	LEBAKSIU	46.071	1.138	1.905	5.287	224	3.911
7	SLAWI	24.082	675	437	2.827	36	2.106
8	DUKUHWARU	33.036	549	896	3.174	106	2.549
9	ADIWERNA	44.957	795	2.737	4.424	105	3.110
10	PANGKAH	47.100	1.064	2.156	5.264	53	3.635
11	KEDUNGBANTENG	27.736	551	583	2.963	26	2.137
12	KRAMAT	29.795	957	1.188	2.956	48	1.982
13	TALANG	33.008	628	2.550	3.575	11	2.488
14	DUKUHTURI	35.478	743	1.723	3.021	85	2.136
15	TARUB	44.475	726	882	5.546	79	4.326
16	SURODADI	45.284	666	2.495	4.469	21	3.195
17	WARUREJO	36.334	401	414	3.811	22	2.719
18	JATI NEGARA	34.681	741	1.586	4.047	17	2.892
JUMLAH		742.380	13.628	26.060	81.601	1.134	59.809

PERSEBARAN BDT KAB. TEGAL

Dasar : Permensos 71/HUK/2018




NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH
1	MARGASARI	49,362
2	BUMIJAWA	57,362
3	BOJONG	46,134
4	BALAPULANG	58,941
5	PAGERBARANG	23,679
6	LEBAKSIU	45,002
7	JATINEGARA	32,792
8	KEDUNG BANTENG	29,267
9	PANGKAH	50,726
10	SLAWI	26,575
11	DUKUHWARU	27,833
12	ADIWERNA	45,150
13	DUKUHTURI	35,555
14	TALANG	32,055
15	TARUB	49,762
16	KRAMAT	33,222
17	SURADADI	41,650
18	WARUREJA	37,057
JUMLAH		722,124

SEBARAN BDT BERDASARKAN NIK DAN NON NIK



NO	KECAMATAN	BDT HUK/71/2018		
		BER-NIK	NON-NIK	%
1	ADIWERNA	32,446	12,704	39.15
2	BALAPULANG	48,388	10,553	21.81
3	BOJONG	34,621	11,513	33.25
4	BUMIJAWA	33,413	23,949	71.68
5	DUKUHTURI	29,403	6,152	20.92
6	DUKUHWARU	21,240	6,593	31.04
7	JATINEGARA	25,328	7,464	29.47
8	KEDUNGBANTENG	24,518	4,749	19.37
9	KRAMAT	26,930	6,292	23.36
10	LEBAKSIU	36,599	8,403	22.96
11	MARGASARI	30,587	18,775	61.38
12	PAGERBARANG	17,165	6,514	37.95
13	PANGKAH	41,455	9,271	22.36
14	SLAWI	21,947	4,628	21.09
15	SURADADI	34,811	6,839	19.65
16	TALANG	23,572	8,483	35.99
17	TARUB	39,021	10,741	27.53
18	WARUREJA	25,644	11,413	44.51
JUMLAH		547,088	175,036	31.99

SEBARAN DATA KEC. DUKUHWARU						
NO	DESA	BDT			BPNT	PKH
		BDT	NIK	NON NIK		
1	BLUBUK	5.681	3.907	1.774	754	564
2	BULAKPACING	1.343	982	361	130	95
3	DUKUHWARU	4.498	3.614	884	499	361
4	GUMAYUN	2.719	2.130	589	301	231
5	KABUNAN	2.280	1.778	502	280	178
6	KALISOKA	2.409	2.000	409	207	149
7	PEDAGANGAN	1.936	1.632	304	154	107
8	SELAPURA	2.005	1.442	563	189	134
9	SINDANG	1.627	1.380	247	168	139
10	SLARANGLOR	3.335	2.378	957	407	295
Grand Total		27.833	21.243	6.590	3.089	2.253

 DINAS SOSIAL	<h2 style="margin: 0;">BAB IV</h2> <h1 style="margin: 0; color: red;">PENUTUP</h1>
--	--

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Tinggi, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (99,71 %), dengan rincian per sasaran sebagai berikut:

1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	99,55 %
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	96,42 %
3	Program pembinaan anak terlantar	100%
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100 %
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	100%
6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	102,04 %
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas

Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, antara lain :

1. Data kemiskinan yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya dijadikan acuan sebagai pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih belum akurat.
2. Masih tingginya PMKS jalanan membutuhkan dukungan maksimal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam sinergi dan kemitraan penanganannya.
3. Peran PSKS dalam penanganan PMKS di wilayah masih perlu dorongan dan dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD Kabupaten/Kota.
4. Penanganan PMKS di tingkat HULU (keluarga dan Masyarakat) belum simultan dengan penanganan langsung (direct services) pada PMKS, diperlukan harmonisasi dan strategi pola penanganan yang komprehensif, simultan dan berkelanjutan.
5. Daya tampung Balai Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terbatas belum ditindaklanjuti oleh pendirian Shelter penampungan/ persinggahan oleh Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten/kota yang berdampak pada keberlanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.

C. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di masa mendatang antara lain :

1. Pendampingan dan perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak korban tindak kekerasan
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan

3. Penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
6. Peningkatan Profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial
7. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Loka Bina Karya (LBK).

9. Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 dari OPD Dinas Sosial Kabupaten Tegal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Slawi, Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL

Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700426 199001 2 001

- 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan
- 3) Program pembinaan anak terlantar didukung oleh 1 (satu) kegiatan)
- 4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma didukung oleh 1 (satu) kegiatan.
- 5) Program pembinaan panti asuhan / panti jompo didukung oleh didukung oleh 1 (satu) kegiatan.
- 6) Program pembinaan eks. penyandang penyakit sosial (eks. narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) didukung oleh 2 (dua) kegiatan
- 7) Program pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial didukung oleh 3 (tiga) kegiatan.

Dari 7 (tujuh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan semua dapat terlaksana dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

SKPD menetapkan 18 target indikator kinerja yang bersumber dari 1 sasaran strategis dan telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Anggaran dan realisasi dana yang dicapai untuk Tahun 2016 berdasarkan akuntabilitas

keuangan dan jenis belanja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realiasi kinerja tahun ini;

**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA,
TARGET KINERJA DAN PROGRAM DINAS SOSIAL
TAHUN 2018**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2018			
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Korban Bencana, Penyakit Masyarakat) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)	Jumlah PMKS yang ditangani	175,00	175,00	100 %	
		Persentase PMKS ditangani	30,50	30,50	100%	
		Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	300,00	300,00	100 %	
		Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	7,52	7,5	100 %	
		Jumlah lansia terlantar yang ditangani	175	175	100 %	
		Persentase lansia terlantar yang ditangani	11,5	11,5	100 %	
		Jumlah PMKS direhabilitasi sosial	450	450	100%	
		Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30,00	30,00	96,42	
		Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi	430	425	96%	
		Persentase korban bencana yang ditangan	100,00	100,00	100 %	
			Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450,00	450,00	100 %
			Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	13,80	13,11,00	100 %
			Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	250,00	250,00	100 %
			Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	5,8	5,8	100 %
			Jml pengidap narkoba yg ditangani	65,00	65,00	40,00
			Persentase pengidap narkoba yang ditangani	13,5	11,5	85 %
			Jml pengidap PMS yang ditangani	125,00	110,00	96 %
			Persentase pengidap PMS yang ditangani	6	6	92,98 %
			Jumlah pengidap HIV/AIDS yang ditangani	30,00	30,00	100 %

